

RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SD 2
(3 SKS)



Dosen Pengampu :
Selly Rahmawati (19870723 201302 2 002)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Pendidikan Kewarganegaraan SD 2	K46217	Pedagogi	T=3	P=0	2	23 Januari 2024
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI					
	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;				
	S8	Menginternalisasi nilai, norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.				
	KU 1	mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya				
	KU 3	mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi				
	KU 5	mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data				
	P3	menguasai pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PPKn, SBdP, dan PJOK				
	KK 3	Mampu menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKn, SBdP, dan PJOK melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran dengan metode saintifik sesuai dengan etika akademik				
	CPMK					
	CPMK	Mahasiswa mampu : 1. Mengidentifikasi materi-materi PKn SD kurikulum merdeka pada kelas tinggi 2. Menjelaskan korelasi konsep pendidikan kewarganegaraan dengan nilai-nilai, norma, moral dan tata hukum di Indonesia (S8, P3) 3. Menjelaskan dan menganalisis perspektif mendasar dan dinamika terkini tentang hak-hak dan kewajiban warga negara dalam praktik penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.(S7, P3) 4. Mengaplikasikan konsep kewarganegaraan, untuk menjadikan warga negara yang baik yang mampu mendukung bangsa dan negara, warga negara yang demokratis (P3, KU 1) 5. Mengambil keputusan yang tepat dengan mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi hukum dan HAM serta hubungan internasional yang adil.(KU 5, S7, KK 3) 6. Menganalisis implikasi hak dan kewajiban anak dalam pembelajaran di SD (KU 3, P3)				
Diskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini difokuskan pada materi: (1) norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional dan (2) hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, serta pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.					

Minggu Ke-	Sub-CPMK	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan, [Media & Sumber Belajar] [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
1	<p>1. Memahami konsep dasar Pembelajaran PPKn di sekolah dasar dalam kurikulum merdeka</p> <p>2. Mampu mengidentifikasi materi PPKn berdasarkan kurikulum merdeka</p> <p>3. Mampu menganalisis materi PPKn SD kelas tinggi berdasarkan kurikulum merdeka</p>	<p>1. Ketepatan dalam menjelaskan konsep dasar pembelajaran PPKn pada kurikulum merdeka di SD</p> <p>2. Ketepatan dalam mengidentifikasi materi PPKn SD kelas tinggi ,</p> <p>3. ketepatan dalam menganalisis materi PPKn SD kelas tinggi</p>	<p>Kriteria penilaian: Pedoman Penskoran</p> <p>Bentuk penilaian: Membuat peta konsep materi PPKn SD kelas tinggi.</p>	<p>Bentuk pembelajaran: kuliah</p> <p>Metode pembelajaran: diskusi [TM =1x(3x50")]</p> <p>Tugas 1: membuat mindmapping materi PPKn SD kelas tinggi [PT+BM=(1+1)x(3x60")]</p>	<p>Materi: materi pembelajaran PKn dan telaah materi PKn dalam kurikulum merdeka di kelas tinggi di SD.</p> <p>Daftar Pustaka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Belmawa Kemenristekdikti. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. 2. Badan Standar, kurikulum dan assessment pendidikan Kemdikbudristek. (2022). Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Fase A-Fase F. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi 3. Retnasari, Lisa, Yayuk Hidayah & Suyitno. (2021). 	10%

					<p>Materi pembelajaran PPKn SD. Yogyakarta: K-Media</p> <p>4. Winataputra, Udin S, dkk. (2007). Materi dan Pembelajaran PKN SD (Cetakan Kesebelas). Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.</p>	
2	Mampu menjelaskan makna identitas negara khususnya lambang Negara Garuda Pancasila	Ketepatan dalam menjelaskan lambang Pancasila	<p>Kriteria penilaian: Pedoman penskoran</p> <p>Bentuk penilaian: Membuat poster terkait lambang Pancasila</p>	<p>Bentuk pembelajaran: Kuliah</p> <p>Metode pembelajaran: Diskusi [TM = 1x(3x50")]</p> <p>Tugas 2: Membuat review terkait lambang Pancasila dalam bentuk poster [PT+BK= (1+1)x(3x60")]</p>	<p>Materi: Identitas Negara, sejarah lambang Garuda, Pancasila, makna lambang Negara dan penggunaan lambang Negara</p> <p>Daftar Pustaka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Turiman. Menelusuri Jejak lambang Negara RI Berdasarkan Analisis Sejarah hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan tahun -44. No 1 Januari - Maret 2014. 2. Soekarno. (2019). Filsafat Pancasila menurut Bung Karno. Jakarta: Media Pressindo. 	5%
3	Mampu menjelaskan hubungan Konsep, Nilai, Moral, dan Norma dengan Tuntutan Perilaku Warga Negara	Ketepatan dalam menjelaskan hubungan konsep, nilai, moral, dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara	<p>Kriteria penilaian: Pedoman Penskoran</p> <p>Bentuk penilaian: Studi kasus isu pelanggaran moral/norma terkini</p>	<p>Bentuk pembelajaran: kuliah</p> <p>Metode pembelajaran: Problem based learning [TM = 1 x(3x50")]</p> <p>Tugas 3: analisis permasalahan terkait konsep, nilai, moral, norma dan tata hukum Indonesia dengan tuntutan perilaku warga negara [PT+BM=(1+1)x(3x60")]</p>	<p>Materi: Konsep, nilai, moral, dan norma. Tuntutan perilaku warga Negara, hubungan konsep, nilai, moral dan norma.</p> <p>Daftar Pustaka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lawrence, Kohlberg, (1995). Tahap-tahap perkembangan moral, kanisius, Yogyakarta 2. Sudin. (2011). Pemikiran 	5%

					<p>Hamka Tentang Moral. Jurnal ESENSIA Vol XII No. 2 Juli 2011</p> <p>3. Rohmat M., (2004), (2004), Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, Alfabeta, Bandung</p>	
4-5	Mampu menganalisis system hukum dan peradilan di Indonesia	Kejelasan dalam menganalisis system hukum dan peradilan di Indonesia	<p>Kriteria penilaian: Pedoman penskoran</p> <p>Bentuk penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat critical review terkait system hukum Indonesia 2. Membuat presentasi komparasi fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga peradilan di Indonesia 	<p>Bentuk pembelajaran: Kuliah</p> <p>Metode pembelajaran: problem based learning terkait fenomena-fenomena dalam system hukum di Indonesia [TM =1x(3x50'')]</p> <p>Tugas 4: Melakukan analisis fenomena-fenomena dalam system hukum di Indonesia [PT+BM=(1+1)x(3x60'')]</p> <p>Bentuk pembelajaran: Kuliah tentang lembaga peradilan di Indonesia</p> <p>Metode pembelajaran: Diskusi [TM =1x(3x50'')]</p> <p>Tugas 5: mengkomparasikan fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga peradilan di Indonesia [PT+BM=(1+1)x(3x60'')]</p>	<p>Materi: pengertian dan penggolongan hukum, prinsip-prinsip negara hokum dan lembaga peradilan di Indonesia</p> <p>Daftar Pustaka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R. Abdoel Djamali. (2003). Pengantar Hukum Indonesia. Bandung: Raja Grafindo Persada. 2. Adi Sulistiyono dan Isharyanto. (2018). Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik, Depok: Prenamedia Group. 	10%
6	Mampu menjelaskan konsep hubungan internasional, perjanjian	Kejelasan dalam menjelaskan hubungan internasional, perjanjian internasional dan diplomatik	<p>Kriteria penilaian: Pedoman penskoran</p> <p>Bentuk penilaian:</p>	<p>Bentuk pembelajaran: Kuliah</p> <p>Metode pembelajaran: Problem based Learning [TM =1x(3x50'')]</p>	<p>Materi : pengertian hubungan internasional, Sejarah hubungan internasional (Sejarah dunia Pra Westphalia sampai dengan Pasca</p>	5%

	internasional dan diplomatic		Studi kasus peran perwakilan diplomatik	<p>Tugas 6: Studi kasus peran perwakilan diplomatic dalam kasus-kasus TKI luar negeri [PT+BM=(1+1)x(3x60'')]</p>	<p>Westphalia). Pengertian perjanjian internasional. Tahap-tahap perjanjian internasional. Sumber-sumber hukum diplomatic (konvensi Wina). Fungsi dan peran perwakilan diplomatic dan konsuler.</p> <p>Daftar pustaka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S.M. Noor, Birkah Latif dan Kadarudin. (2016). Hukum Diplomatic dan Hubungan Internasional. Makasar: Pustaka Pena 2. David Armstrong, Theo Farrell a H�elene Lambert (eds.). 2007. International Law and International Relations, New York: Cambridge University Press 	
7	Mampu menentukan peranan dan fungsi organisasi internasional	Kejelasan menentujan peran dan fungsi organisasi internasional	<p>Kriteria penilaian: Pedoman penskoran</p> <p>Bentuk penilaian: Studi kasus peran dan fungsi organisasi internasional dalam fenomena-fenomena hubungan internasional</p>	<p>Bentuk pembelajaran: kuliah</p> <p>Metode pembelajaran: Problem based learning [TM =1x(3x50'')]</p> <p>Tugas 7: Melakukan analisis studi kasus peran dan fungsi organisasi internasional dalam fenomena-fenomena hubungan internasional [PT+BM=(1+1)x(3x60'')]</p>	<p>Materi: Definisi organisasi internasional dan peranan dan fungsi organisasi internasional dalam fenomena hubungan internasional.</p> <p>Daftar Pustaka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Citra Hennida, (2015), Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan, Institusi Multilateral, Malang: Intrans Publishing, 	5%

					2. Clive Archer. (2001) International Organization. 2nd ed. London: Routledge.	
8-9	Mampu menjelaskan sistem hukum dan peradilan Internasional	Kejelasan system hukum dan peradilan internasional	<p>Kriteria penilaian: Pedoman penskoran</p> <p>Bentuk penilaian: Makalah analisis dinamika politik dunia terhadap peradilan internasional dan studi kasus internasional terkini dan critical review efektifitas peradilan internasional</p>	<p>Bentuk pembelajaran: Kuliah</p> <p>Metode pembelajaran: Problem based solving [TM =1x(3x50'')]</p> <p>Tugas 8: Analisis perubahan dinamika politik dunia terkini dan dampaknya pada peradilan internasional. [PT+BK=(1+1)x(3x60'')]</p> <p>Bentuk pembelajaran: Kuliah</p> <p>Model pembelajaran: Problem based learning tentang sengketa internasional terkini dan peran mahkamah internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional [TM =1x(3x50'')]</p> <p>Tugas 9: studi kasus peradilan internasional yang terkini dan kritik terhadap efektifitas peradilan internasional [PT+BK=(1+1)x(3x60'')]</p>	<p>Materi: Makna hukum internasional, sejarah perkembangan hukum internasional, peradilan internasional, sengketa internasional dan peran mahkamah internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional</p> <p>Daftar Pustaka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes, (2002), Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung. 2. Boer Mauna, (2000), Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Bandung: Alumni. 3. D.J. Harris. (1998). Cases and Material on International Law. Sweet and Maxwell, London. 	15%
10	Menganalisis peranan pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan	Ketepatan analisis peranan, pemajuan, pemenuhan,	<p>Kriteria penilaian: Pedoman penskoran</p> <p>Bentuk penilaian:</p>	<p>Bentuk pembelajaran: Kuliah</p> <p>Model pembelajaran:</p>	<p>Materi: definisi HAM, perlindungan HAM dalam Undang-undang,</p>	10%

	penegakan HAM di Indonesia	perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia	Studi kasus pelanggaran HAM di Indonesia	Problem based learning [TM =1x(3x50")] Tugas 10: membuat makalah analisis studi kasus pelanggaran HAM yang actual di Indonesia [PT+BM=(1+1)x(3x60")]	tugas dan wewenang KOMNAS HAM, peradilan yang menangani kasus pelanggaran HAM (peradilan umum dan peradilan HAM khusus), dan isu actual dalam konteks HAM di Indonesia Daftar Pustaka: 1. Badan standar, kurikulum dan assesmen pendidikan kemdikbudristel. Panduan pengembangan kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan. 2022. Kemdikbudristek 2. Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005 3. Hughes, P. (2001) The monitoring and evaluation of curriculum reforms. In Final Report of the Muscat Seminar on the Management of Curriculum Adaptation for Curriculum Specialists in the Persian Gulf Region (pp. 53-59).	
11	Mampu menganalisis hak anak dan perlindungan anak dalam instrument hukum di Indonesia	Ketepatan analisis hak anak dan perlindungan anak dalam instrument hukum di Indonesia	Kriteria penilaian: Pedoman penskoran Bentuk penilaian: Laporan hasil critical review peraturan perundang-undangan terkait hak anak dan	Bentuk pembelajaran: kuliah Metode pembelajaran: Diskusi [TM =1x(3x50")] Tugas 11: Critical review peraturan	Materi: Pengertian anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hukum pidana anak	10%

			perlindungan anak	perundang-undangan Indonesia terkait hak anak dan perlindungan anak [PT+BM=(1+1)x(3x60'')]	dan acara pidana anak serta analisis tentang kasus hukum terkait anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban (analisis putusan pengadilan yang melibatkan anak sebagai korban dan pelaku) Daftar Pustaka: 1. Maidi Gultom, 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Refika Aditama, Bandung. 2. UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO 3. UU 39 Tahun 1999 4. UU No.11 tahun 2012 5. UU No.35 tahun 2014 6. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM	
12-13	Mampu menjelaskan karakteristik warganegara Yang baik	Ketepatan dalam menjelaskan karakteristik warganegara yang baik	Kriteria penilaian: Pedoman Penskoran Bentuk penilaian: Mini research	Bentuk pembelajaran: kuliah Metode pembelajaran: Project based learning [TM =2 x(3x50'')] Tugas 12: membuat penelitian sederhana terkait tokoh public yang dianggap sebagai warga Negara yang baik [PT+BM=(2+2)x(3x60'')]	Materi: ciri generic warga negara yang baik dan ciri warga negara yang baik dalam konteks global Daftar Pustaka: 1. Levinson, M. (2014). Citizenship and Civic Education. In D. C. Phillips (Ed.), Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy (pp. 134-138). Thousand Oaks, California: Sage.	10%

					2. Kalidjernih, F. K. (2009). Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan. Bandung: Widya AKsara Press.	
14-15	Mampu menjelaskan pengertian, sejarah dan implementasi Bhineka tunggal ika	Ketepatan menjelaskan pengertian, sejarah dan contoh implementasi bhineka tunggal ika	<p>Kriteria penilaian: Pedoman penskoran</p> <p>Bentuk penilaian: Penelitian sederhana terkait implementasi bhineka tunggal ika di lingkungan sekitar</p>	<p>Bentuk pembelajaran: kuliah</p> <p>Metode pembelajaran: Project based learning [TM =1 x(3x50”)]</p> <p>Tugas 13: membuat penelitian sederhana terkait implementasi bhineka tunggal ika di lingkungan sekitar PT+BM=(1+1)x(3x60”]</p>	<p>Materi: pengertian, sejarah, peran dan implementasi bhineka tunggal ika</p> <p>Daftar Pustaka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abdullah, Irwan. 2006. Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2. A. Ubaidillah dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Jakarta : IAIN Jakarta Prees, 2000 	10%
	UAS					5%

